



Ermin Elviani, SH/Wakil Ketua

DPRD Provinsi Kalbar

Parlemen Kalbar

Akan Bentuk Panja Aset,

Guna Menginventarisir

Persoalan Aset Pemprov

SEPANJANG tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalbar kerap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Kalbar Tahun Anggaran 2014.

Bahkan, BPK RI mengapresiasi tindak lanjut yang dilakukan Pemprov Kalbar atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran (TA) 2013 berdasarkan rekomendasi dari BPK RI.

Meskipun demikian, yang masih perlu diperhatikan pengelolannya adalah beberapa aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalbar. Yakni, aset tetap berupa tanah, peralatan mesin serta enam gedung dan bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yakni gedung PU, Pertanian, Biro Umum, Dispenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD Soedarso. Keenam gedung tersebut perlu perbaikan dan peningkatan kualitas (upgrade) lebih lanjut.

Hal ini juga menyangkut adanya catatan dari BPK RI atas laporan Pemerintah Provinsi Kalbar yang dinilai perlu adanya laporan perbaikan pembenahan aset daerah. Bahkan, dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar dan Penetapan DPRD Provinsi Kalbar tentang Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPRD Kalbar, Selasa (23/6).

Di mana fraksi-fraksi mengharapkan pembentukan panitia kerja (panja) tentang aset Pemerintah Provinsi Kalbar guna menginventarisir persoalan aset Pemerintah Provinsi Kalbar.

Lalu persoalan apa sajakah yang selama ini kerap menggerayangi aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga sejak beberapa periode DPRD Provinsi Kalbar kerap menyoroti secara kritis persoalan aset tersebut.

Tetapi mengapa upaya yang kerap dilakukan wakil rakyat untuk menginventarisir segala persoalan aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar melalui pembentukan pansus aset selalu kandas? Bahkan tak jarang upaya pembentukan pansus aset berakhir dengan voting di parlemen Kalbar.

Berikut petikan wawancara wartawan Rakyat Kalbar bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH, di ruang kerjanya, Selasa (23/6).

+Mengapa persoalan aset Pemerintah Provinsi Kalbar sejak dulu hingga sekarang terkesan sulit untuk diinventarisir?

-Saya kira masalah aset Pemerintah Provinsi Kalbar itu hanya kekurangan administrasi yang perlu disempurnakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Sehingga ke depan penilaian BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar bisa semakin baik.

Apalagi selama tiga tahun berturut-turut BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar.

+Di mata Anda, seberapa serius Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya untuk menyelesaikan persoalan aset itu sendiri?

-Saya kira Pemerintah Provinsi Kalbar sangat serius untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi persoalan aset ini menyangkut aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang notabene merupakan aset Negara.

Dan saya kira Pemerintah Provinsi Kalbar juga tidak akan semena-mena di dalam mengelola persoalan aset milik Pemprov. Karena kalau sembarangan tentu mereka bisa dipenjara.

Saya yakin, Pemerintah Provinsi Kalbar akan bersungguh-sungguh dalam mengelola aset milik Provinsi Kalbar.

+Seberapa besar optimistis Anda bahwa panja aset akan terbentuk? Bahkan bisa ditingkatkan dengan membentuk pansus aset?

-Saya optimis panja aset akan terbentuk. Apalagi hal itu berdasarkan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalbar.

Setelah panja berhasil menginventarisir masalah aset tentunya bisa ditingkatkan dengan membentuk pansus aset.



+Informasinya beberapa aset Pemprov ada yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalbar?

-Aset Pemerintah Provinsi Kalbar memang tersebar di seantero Provinsi Kalbar. Namun saya belum mendapatkan laporan secara detail terkait hal itu.

+Seberapa penting aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang perlu dipertahankan atau malah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalbar?

-Tentunya kita perlu melihat dulu urgensi dari keberadaan aset tersebut. Tentu tidak bisa sembarangan di dalam melepaskan aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar, baik berupa ruislag maupun hibah. Harus disesuaikan dengan segala ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

+Apa saja harapan Anda seputar keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang tersebar di seantero Provinsi Kalbar?

-Saya berharap DPRD Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar bisa bersinergi di dalam menelusuri segala aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar serta mengelolanya secara proporsional. Sehingga keberadaan aset tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Provinsi Kalbar.

Reporter: Andry Soe

